

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM FASILITASI PENUMBUHAN WIRUSAHA BARU DI PONDOK PESANTREN *ANALYSIS ON THE EFFECTIVENESS OF NEW ENTERPRENEUR DEVELOPMENT PROGRAM IN PONDOK PESANTREN*

Renny Kurniawati¹, Indrani Dharmayanti², Intan Maria Lewiayu³, Eko Pratomo⁴ dan Budi Hartono⁵.

E-mail: rennyfahidi@gmail.com

¹⁻⁴ Politeknik APP Jakarta, Jl. Timbul No. 34 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12630

⁵ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian RI

ABSTRAK

Sebagai upaya mendukung program santripreneur dalam menumbuhkan jiwa wirausaha, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal IKMA memberikan bantuan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, bantuan alat dan pameran. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas program fasilitasi tersebut, mengukur dampak program terhadap pengembangan usaha Pesantren dilihat dari tingkat produksi, omset, tenaga kerja dan pasar, serta menyusun rekomendasi penyempurnaan program dimasa mendatang. Survey dilakukan di 27 pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis persepsi, statistik deskriptif, analisis uji T serta analisis kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa program sebagian besar terlaksana dengan lancar, dan memberikan manfaat. Bantuan telah mendorong terbentuk dan berkembangnya unit usaha di Pesantren. Peralatan selain untuk produksi, juga sebagian untuk media pembelajaran. Namun secara individual, sampai saat ini santri belum bisa membangun usaha mandiri sesuai pelatihan yang diikuti, karena tidak memiliki peralatan secara mandiri. Program fasilitasi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penumbuhan dan pengembangan usaha Pesantren yaitu peningkatan produksi, omset, dan tenaga kerja. Namun aspek pasar sebagian besar belum berkembang, masih untuk lingkungan internal. Berdasar identifikasi permasalahan dan perumusan strategi, beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan yaitu peningkatan komunikasi pemerintah dengan pesantren dalam penentuan jenis pelatihan maupun spesifikasi alat, proposal yang diajukan harus menggambarkan potensi pesantren, peningkatan durasi pelatihan dan materi pelatihan lanjutan untuk peningkatan skill peserta, adanya pendampingan setelah pelatihan, memberi akses sumber bahan baku dan sparepart yang spesifik kepada pesantren. Diharapkan program ini dapat mewujudkan Pondok Pesantren mandiri dan menjadi kekuatan ekonomi saat santri kembali ke masyarakat.

Kata kunci: Program Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Baru, Analisis Efektivitas dan Dampak, Santripreneur

ABSTRACT

To encourage santripreneur program, Directorate General of Small Medium and Miscellaneous Enterprises is actively facilitating the development of new entrepreneur through the program of providing machinery and production equipment, training, and exhibitions. This study aims to measure the effectiveness of New Entrepreneur Development Program in Islamic Boarding School and formulate some recommendations. The survey was conducted in 27 Islamic boarding schools. Perception and descriptive statistics, T test and qualitative analysis are used to obtain the result and recommendations. The results show that the programs are carried out smoothly and gain some benefits. There are a significant impact in establishing new business units, increasing production, turnover and manpower. However, the trainees have not been able to build businesses by themselves due to the lack of production equipment. Finally this study provides some recommendations could to be taken into consideration in improving of new entrepreneur development program.

Keywords: New Entrepreneur Development Program, Effectiveness and Impact Analysis, Santripreneur

1. PENDAHULUAN

Sektor industri manufaktur merupakan salah satu sektor bisnis yang mempunyai prospek dan potensi yang besar untuk berkembang dalam rangka memproduksi barang kebutuhan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kemandirian nasional, disamping akan menghasilkan *multiplier effect* dari berkembangnya industri (kecil, menengah maupun besar) sehingga akan memberi kesempatan kerja yang luas pada rakyat Indonesia. Oleh karena itu berbagai kementerian dan instansi memberikan dukungan yang besar untuk penumbuhan wirausaha baru, khususnya di sektor industri.

Penciptaan wirausaha baru merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang diarahkan untuk dapat dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 19 UU No 20 tentang UMKM menjelaskan tentang pengembangan dalam bidang sumber daya manusia, yang mengharuskan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan; pemasaran; pengembangan sumber daya manusia; desain dan teknologi, dengan cara membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Selain itu, terdapat Instruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, dilanjutkan dengan Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional Tanggal 2 Februari 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Kementerian Perindustrian sendiri memberi porsi cukup besar bagi pengembangan wirausaha baru (WUB) industri kecil dan menengah. Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, tercantum bahwa pembangunan wirausaha industri yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi. Upaya untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru

industri kecil menengah juga tercantum dalam Visi, Misi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA). Direktorat Jenderal IKMA mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan, standarisasi industri dan teknologi industri, peningkatan daya saing, penumbuhan wirausaha, penguatan kapasitas kelembagaan, pemberian fasilitas, serta promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan industri menengah agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, maritim, serta elektronika dan telematika. Dengan visi Mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Yang Berdaya saing Global, Direktorat Jenderal IKMA memiliki Misi: meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi, mendorong tumbuhnya wirausaha baru IKM, mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern, mendorong peningkatan perluasan pasar, mendorong peningkatan nilai tambah, mendorong perluasan akses sumber pembiayaan, dan mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa.

Melihat peran wirausaha yang sangat penting dalam perekonomian nasional, yaitu dalam menciptakan dan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta meningkatkan perekonomian masyarakat, maka Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal IKMA telah melakukan program fasilitasi penumbuhan wirausaha baru (WUB) melalui berbagai kegiatan yaitu pelatihan, pemberian bantuan alat, juga bantuan pemasaran.

Bentuk program pengembangan WUB IKM berupa pelatihan ditujukan termasuk kepada kelompok masyarakat tertentu, termasuk juga pondok pesantren yang termasuk lembaga keagamaan. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi yang diberikan kepada pondok pesantren adalah di bidang:

- a. Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur;
- b. Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan; serta
- c. Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut.

Salah satu kekuatan penumbuhan wirausaha yang besar yaitu berada di Pondok Pesantren. Dengan program santripreneur diharapkan akan tumbuh jiwa-jiwa wirausaha di kalangan para santri, yang dapat mendorong terwujudnya Pondok Pesantren mandiri, dan menjadi kekuatan ekonomi pada saat para santri kembali ke masyarakat. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan industri di Indonesia sebagai *“Agent of Development”* yang sangat penting dan strategis dalam mengembangkan sumber daya masyarakat di daerah sehingga menjadi sarana yang penting dalam

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Pondok Pesantren para santri dibekali berbagai ilmu agama, sosial, juga dibekali dengan ilmu ekonomi dan kewirausahaan yang diharapkan dapat menjadi bekal mereka pada saat kembali ke masyarakat. Fungsi Pesantren Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, adalah menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan.

Sejak tahun 2013 hingga akhir 2019, Kemenperin telah melakukan pembinaan kepada 46 Pondok pesantren yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan Timur, dan Banten dengan jumlah peserta yang dibina sebanyak 8.628 santri [1]. Kemenperin berusaha fokus untuk terus menelurkan WUB industri khususnya sektor IKM. Terutama untuk merebut peluang dari bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia hingga tahun 2030. Strategi penumbuhan dan pengembangan WUB IKM yang dilakukan berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Strategi penumbuhan dan pengembangan WUB IKM

KRITERIA	BY DESIGN	FAST TRACK
Sifat Penumbuhan	Jangka Menengah	Jangka Pendek
Lokasi Sasaran	Perguruan Tinggi/Sekolah	Sentra/Kelompok
Obyek Peserta	Calon/Lulusan PT/SMK	Karyawan IKM
Tingkat Teknologi	Menengah/Modern	Sederhana
Content Pelatihan	Motivasi/Kewirausahaan dan Teknis Produksi	Teknis Produksi
Pembinaan Lanjutan	Kemitraan Produksi, Pasar, Teknologi, Modal, SDM	Kemitraan Produksi dan Pemasaran

Sumber : Direktorat Jenderal IKMA, 2020

Penumbuhan wirausaha baru melalui pondok pesantren termasuk pola fast track. Model Penumbuhan WUB dan Pengembangan Unit Industri di lingkungan pondok

pesantren atau dikenal dengan program “Santri Berindustri, memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan unit industri dan wirausaha industri baru di pondok pesantren melalui (1) pengembangan unit industri yang telah ada dan/atau menumbuhkan unit industri baru; dan (2) pengembangan sumber daya manusia pondok pesantren menjadi wirausaha industri baru melalui kompetensi teknis produksi, jejaring, dan manajemen, dengan ilustrasi sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Program Pengembangan WUB Melalui Pola Fast Track.

Namun demikian keberhasilan suatu program, tidak hanya ditentukan dari seberapa besar dana yang telah berhasil digelontorkan kepada IKM melalui bantuan alat, bimtek dan pameran, tetapi seberapa besar dana tersebut dapat memberikan manfaat bagi menumbuhkan usaha IKM yang bersangkutan dan bahkan lingkungan sekitarnya. Sehingga perlu dikaji seberapa besar tingkat efektivitas dan dampak dari program fasilitas penumbuhan WUB yang telah dilakukan tersebut? Keberhasilan dalam mencapai tujuan, sebagian ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan sebagian lagi oleh fungsi pengawasan atau monitoring [2]. Untuk melihat keberhasilan suatu program, selain melakukan monitoring, sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal [3]. Secara teoritis, evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu [4]. Oleh karena itu kajian monitoring dan evaluasi menjadi suatu keharusan dilakukan pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan agar dana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dapat tepat guna dan tepat sasaran, serta memberikan dampak yang sebesar-besarnya

bagi masyarakat. Selain itu bagaimana prioritas, permasalahan dan kendala yang dihadapi? Sehingga diperoleh strategi yang tepat untuk pelaksanaan program serupa dimasa yang akan datang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan dampak pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru (WUB), juga mengumpulkan informasi dan merumuskan rekomendasi bagi pemerintah (Kemenperin) dan stakeholder untuk menentukan kebijakan dalam mendukung keberhasilan program fasilitasi penumbuhan wirausaha baru di pondok pesantren.

Keberhasilan suatu program mengandung dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya [5]. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah ditetapkan. Secara kuantitatif, efektivitas dapat diukur menggunakan nilai persentase keberhasilan dengan cara membandingkan output yang dihasilkan dengan target output yang ditetapkan. Efektivitas juga dapat menunjukkan ketepatangunaan output yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input (resources) untuk menghasilkan output lewat suatu proses [6]. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu didukung dengan data. Evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (*decision maker*) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program.

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori terkait, hipotesis yang dapat dibangun yaitu bahwa adanya bantuan fasilitasi penumbuhan wirausaha baru memberikan dampak positif secara parsial terhadap peningkatan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, omzet/keuntungan dan area pemasaran unit usaha pondok pesantren.

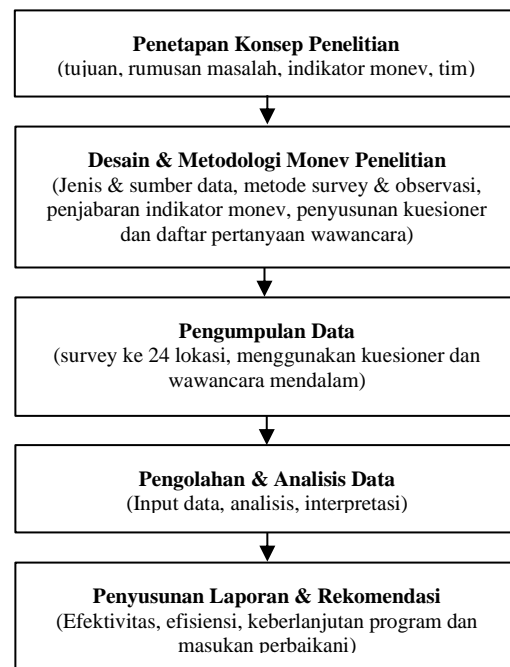
2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah paduan antara metode penelitian kuantitatif dengan kualitatif, sehingga pengumpulan data tidak hanya berupa persepsi responden terhadap program dengan menggunakan kuesioner, namun juga dengan wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk memperoleh keterangan yang lebih dalam dari responden tentang gambaran pelaksanaan program,

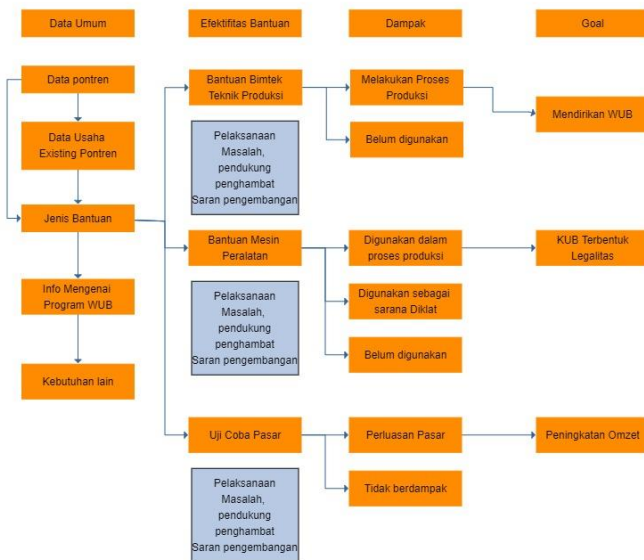
manfaat, kendala dan masukan perbaikan untuk program mendatang. Berdasarkan perumusan masalah, maka kerangka pemikiran monitoring dan evaluasi program fasilitasi penumbuhan wirausaha baru di Pondok Pesantren seperti pada Gambar 2.

Penelitian dilakukan dari bulan September hingga bulan Desember 2020, dengan pengumpulan data dilakukan pada 27 Pondok Pesantren yang mendapat fasilitas penumbuhan WUB dari Direktorat IKMA selama kurun waktu 2017 - 2019, yang tersebar di 4 (empat) Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui survey persepsi responden dengan menggunakan kuesioner, observasi terhadap kegiatan usaha pondok pesantren, dan wawancara mendalam (*in depth interview*). Dari observasi dan wawancara diketahui seberapa besar penggunaan bantuan peralatan produksi yang telah diberikan membantu proses produksi dan meningkatkan produktivitas usaha pondok pesantren. Kerangka pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian.



Gambar 3. Kerangka Pengumpulan Data

Data yang terkumpul baik dari responden pengelola pondok pesantren maupun peserta pelatihan kemudian direkap dan diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada kajian ini dilakukan beberapa tahapan analisis data, disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu

- Pengukuran tingkat efektifitas program penumbuhan WUB dilakukan dengan analisis persepsi yaitu melihat persepsi responden terhadap program. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Berdasarkan skala likert yang digunakan pada instrumen penelitian, diketahui pelaksanaan program kegiatan, penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan serta manfaat program yang dirasakan responden,
- Pengukuran pengaruh program terhadap pertumbuhan wirausaha baru, dilakukan dengan analisis *uji T* untuk melihat bagaimanakah pengaruh variabel bebas yaitu pemberian bimbingan bantuan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan wirausaha secara parsial, yang diukur dari parameter tingkat produksi, omzet, jumlah tenaga kerja yang terserap dan area pemasaran.
- Evaluasi kegiatan dilengkapi dengan data kualitatif dari hasil observasi dan wawancara. Data dilaporkan secara deskriptif dan dianalisis dengan melibatkan tim pakar. Perumusan strategi penumbuhan WUB dimasa yang akan datang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian telah dilakukan pada 27 pondok pesantren yang telah menerima 31 paket bantuan sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 pada program pengembangan WUB IKM dalam bentuk pelatihan, bantuan peralatan dan uji coba pasar melalui pameran di bidang:

- Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur (PBKF);
- Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan (KSIA);
- Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEA)

Dari penerima bantuan tersebut, sebagian besar pada bidang PBKF (48%), kemudian KSIA (39%) dan LMEA (13%).

Pada penelitian ini dilakukan analisis tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam program fasilitasi penumbuhan wirausaha baru, mengukur besar dampak program dan menyusun rekomendasi penyempurnaan program dimana yang akan datang. Berikut ini adalah penjabaran untuk masing analisis tersebut.

a. Data Umum Informasi Program

Dari ke 27 pondok pesantren, 93 % Pondok sudah memiliki usaha dibidang lain sebelum mengikuti program penumbuhan WUB. Hanya 7% pondok yang benar-benar belum memiliki usaha. Keikutsertaan pondok dalam program ini sebagian besar berdasar informasi yang diperoleh dari informasi Direktorat Jenderal IKMA (62%); 15 % dari sesama pondok; 15% dari kegiatan Festival Ekonomi Syariah/FES yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 8% informasi dari Dinas Perindustrian Kota/Kab. Pada umumnya pondok pesantren yang akan memperoleh bantuan perlu mengajukan proposal terlebih dahulu kepada Kemenperin, hanya 30% pondok saja yang langsung diundang oleh Kemenperin.

Motivasi mengajukan bantuan diantaranya 85 % pondok ingin ada fasilitas usaha, agar tercipta lapangan usaha baru dan menghasilkan pendapatan bagi pondok dan 70 % ingin tingkatkan pengetahuan/keterampilan santri. Dalam hal pengajuan proposal, 93% pondok menyatakan pengajuannya mudah, transparan dan cepat. Namun demikian dalam penentuan jenis pelatihan serta bantuan alat, hanya 50% pondok yang terlibat. Sisanya ditentukan oleh Direktorat Jenderal IKMA baik jenis pelatihan maupun spesifikasi peralatannya. Hal ini mempengaruhi tingkat efektifitas dari kegiatan yang dilaksanakan.

b. Pelaksanaan Program dan Efektifitas Bantuan

Dari data yang terkumpul diketahui bahwa sebagian besar program bantuan dilaksanakan di tahun 2018 (62%), hal ini dilihat dari banyaknya responden

penerima bantuan, ditahun 2017 hanya 8% responden, dan di tahun 2019, 30% responden. Dari seluruh penerima bantuan sebagian besar hanya mendapatkan bantuan berupa pelatihan dan perlatan (85 % Pondok pesantren), dan yang mendapatkan bantuan lengkap pelatihan, alat dengan pameran hanya 15 % responden pondok.

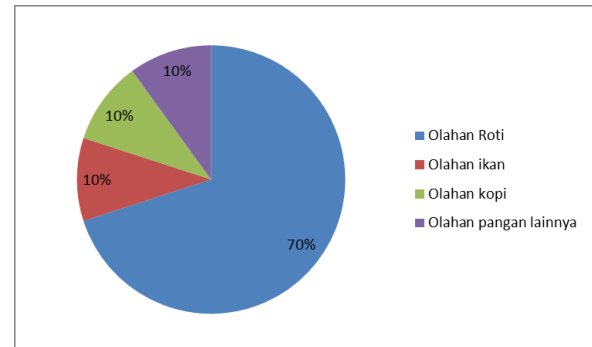
Pada pelaksanaan kegiatan bimtek/pelatihan dan pemberian bantuan alat, 93 % responden menyatakan bahwa kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dan hanya 7 % yang menyatakan bahwa pemberian bantuan alat berjalan lancar namun ada beberapa kendala dalam hal kapasitas dan pengoperasian alat, yaitu pada alat pengolah ikan dan pengolah garam. Kapasitas alat pengolah ikan yang diberikan terlalu kecil. Permintaan bakso ikan cukup tinggi membuat pondok harus cepat produksi, oleh karena itu pondok lebih memilih untuk menggiling bahan diluar, yang menyebabkan peralatan yang diberikan tidak digunakan dan proses pembuatan bakso dilakukan manual (tidak dengan alat). Selain itu alat pengolahan garam agar lebih optimal penggunaan perlu dilakukan modifikasi terlebih dulu.

Dalam pelatihan pembuatan produk homecare, banyaknya jenis produk home care yang dilatih dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan peserta tidak maksimal dalam menyerap setiap materi yang diberikan. Pada saat uji coba mandiri, peserta selalu gagal membuat produk yang dilatih saat pelatihan, hal ini mengakibatkan peserta tidak bisa mengaplikasikan hasil pelatihan dengan baik, sehingga berdampak bantuan alat tidak dimanfaatkan, baik untuk produksi maupun untuk sarana pendidikan dan pelatihan di pondok pesantren.

Pada pengelolaan usaha bidang logam, mesin, elektronik dan alat angkut, sekitar 56% sudah berjalan dengan baik pada bidang perbengkelan untuk kegiatan pendidikan dan bisnis, 10% tidak berjalan, dan 34% dalam persiapan menjalankan usaha. Kendala yang ditemui adalah terdapat beberapa peralatan yang hilang, seperti peralatan LED juga *scanner injector* yang rawan pencurian karena ukuran yang relative kecil dan nilainya yang cukup tinggi. Keterbatasan akses bahan baku juga menjadi kendala pada proses perakitan lampu LED.

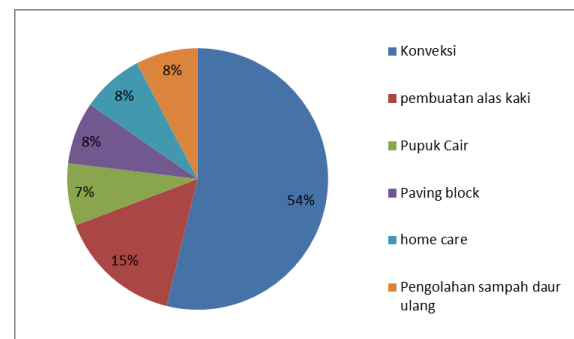
Kendala lain dalam pengaplikasian hasil pelatihan adalah ketidaksesuaian jenis pelatihan yang diberikan dengan kondisi target pasarnya. Sehingga produksi hasil pelatihan tidak bisa dipasarkan, yang akhirnya berdampak pada berhentinya produksi.

Jenis fasilitasi pelatihan dan peralatan pada bidang Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur (PBKF) terdiri dari 70 % pengolahan roti; 10 % olahan pangan; 10 % olahan ikan; 10% olahan kopi.



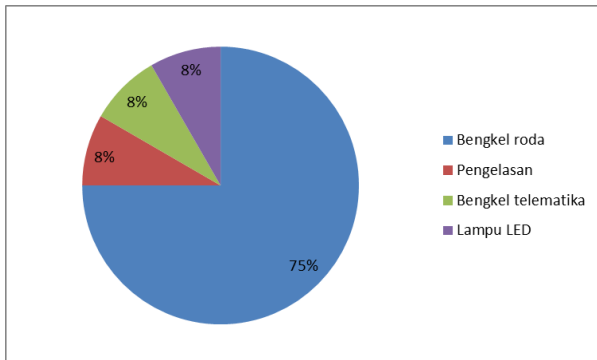
Gambar 4. Jenis Fasilitasi Bidang BPKF

Pada bidang Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan (KSIA) terdiri dari konveksi 58%; pembuatan alas kaki 2%, pupuk cair 5%, pembuatan paving block 5%, pembuatan produk homecare 5%, pengolahan sampah daur ulang 5%.



Gambar 5. Jenis Fasilitasi Bidang KSIA

Pada bidang Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEA) terdiri dari bantuan peralatan perbengkelan roda dua (75%), pengelasan (9%), perbengkelan telematika (8%) dan produksi lampu LED (8%).

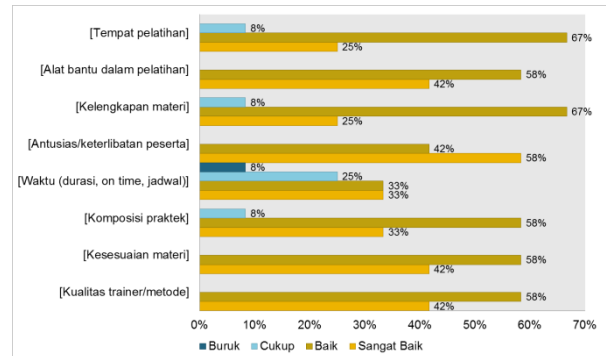


Gambar 6. Jenis Fasilitas Bidang LMEA

Dari informasi pengelola pondok pesantren maupun para responden peserta pelatihan, 100% responden menyatakan pelaksanaan pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren. Sementara dalam hal bantuan peralatan 87% responden menyatakan peralatan sudah sesuai kebutuhan, dan ada 13% yang menyatakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang diperlukan. Tentu hal ini akan mempengaruhi tingkat efektifitas bantuan.

Dilihat dari tujuan utama program yaitu untuk menumbuhkan wirausaha baru, dimana para santri diharapkan menjadi wirausaha baru dibidang yang dilatih. Hal ini belum tercapai/belum efektif, karena 90% santri yang telah dilatih tidak memiliki usaha sendiri dibidang tersebut. Mereka terkendala tidak memiliki peralatan secara mandiri. Namun para santri sebagian membuka usaha dibidang lain, sebagian masih dalam masa pengabdian, dan sebagian lagi tidak diketahui datanya.

Mengingat program bantuan peralatan ini ditujukan bagi Pondok Pesantren sebagai unit bisnis, maka pemberian bantuan tersebut efektif dalam penumbuhan unit usaha di pondok pesantren. Pondok pesantren agak sulit membentuk sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang beranggotakan para santri (WUB) yang telah mengikuti pelatihan, karena para santri berada di pondok terbatas hanya beberapa tahun, yang nantinya akan kembali ke daerah masing-masing. Selain itu dalam hal inipun santri memiliki keterbatasan, dari sisi waktu mereka masih aktif belajar dan belum memiliki peralatan sendiri.



Gambar 7. Penilaian Pelaksanaan Pelatihan

Berdasarkan Gambar 7, terlihat bahwa pelatihan yang diberikan kepada para santri telah dilaksanakan dengan baik dan sangat baik. Catatan yang perlu mendapat perhatian adalah dalam hal durasi waktu pelatihan yang dirasa masih kurang termasuk alokasi waktu untuk praktek, dan materi yang masih perlu ditambah. Materi-materi yang masih perlu diperkaya adalah materi tentang softskill kewirausahaan (kepemimpinan, negosiasi dan motivasi usaha), manajemen keuangan, manajemen pemasaran digital, pembuatan desain dan pola pakaian.

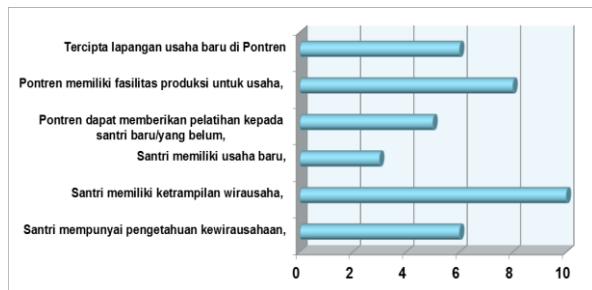
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan pengisian kuesioner, pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan program per bidang dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Bidang Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur (PBKF) : 100% program sudah terlaksana dan 88% unit usaha sudah berjalan.
- 2) Bidang Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka (KSIA) : 100% program sudah terlaksana dan 85% unit usaha sudah berjalan
- 3) Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEA) 100% program sudah terlaksana dan 56% unit usaha sudah berjalan

Melihat efektifitas pelaksanaan diatas, secara umum dapat dihitung besar manfaat dan dampak program.

c. Manfaat dan Dampak Program

Berdasar hasil wawancara maupun pengisian kuesioner, 100% pondok pesantren merasakan manfaat bantuan pada program fasilitasi WUB. Manfaat ini dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 8. Manfaat Program bagi Pondok Pesantren

Dampak program terhadap pertumbuhan unit usaha pondok pesantren, dilakukan dengan analisis *uji T* berpasangan untuk melihat bagaimanakah pengaruh pemberian bantuan (pelatihan, peralatan, pameran) terhadap pertumbuhan kinerja usaha secara parsial, yang diukur dari parameter tingkat produksi, omzet, jumlah tenaga kerja yang terserap dan area pemasaran. Uji yang dilakukan adalah untuk membuktikan hipotesis yang telah disusun sebelumnya yaitu :

H_0 : Kinerja usaha setelah bantuan lebih kecil atau sama dengan sebelum bantuan ($\mu_1 \leq \mu_0$)

H_1 : Kinerja usaha setelah bantuan lebih besar dari sebelum bantuan ($\mu_1 > \mu_0$)

Penarikan kesimpulan pada uji t berpasangan satu arah yaitu jika $|t \text{ hitung}| > t \text{ tabel}$, maka tolak H_0 atau terima H_1 [7].

Dengan melakukan pengujian menggunakan software MS Excel, diperoleh hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program pelatihan dan bantuan alat telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan produksi usaha pondok, penyerapan tenaga kerja, omzet penjualan usaha pondok dan area pemasaran.

Tabel 2. Hasil Analisis Pengaruh Program Bantuan terhadap Pertumbuhan Usaha Pondok Pesantren

Aspek	T hitung	T tabel	Kesimpulan
Tingkat produksi usaha	2,3774	1,7531	Tolak H_0
Tenaga kerja	3,5903	1,7613	Tolak H_0
Omzet penjualan	1,4306	1,7530	Tolak H_0
Area pemasaran	2,0917	1,7613	Tolak H_0

- d. Evaluasi dan perumusan strategi penumbuhan WUB dimasa yang akan datang dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi berbagai masalah yang dapat mengakibatkan kurang efektifnya bantuan yaitu
- 1) bantuan tidak sesuai kebutuhan;
 - 2) jenis dan spesifikasi mesin tidak sesuai kapasitas;
 - 3) tidak ada proses diskusi dalam penentuan pelatihan dan fasilitas atau alat;
 - 4) pasar tidak sesuai atau tidak siap dengan produk yang dihasilkan;
 - 5) ketidaksiapan pondok pesantren memelihara alat;
 - 6) terdapat beberapa jenis materi pelatihan yang tidak fokus dan tidak tuntas;
 - 7) durasi waktu pelatihan yang kurang lama;
 - 8) bantuan alat tidak diperhitungkan skala ekonomi produksi serta
 - 9) target pasar yang terlalu spesifik sehingga pada saat pasar tersebut tidak ada (saat pademi santri harus pulang) maka produksi menjadi terhenti.

Beberapa aktor yang terlibat dalam keberhasilan program yaitu Kementerian Perindustrian yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal IKMA, Dinas Perindustrian Kota dan Kabupaten serta Pondok Pesantren. Setelah dilakukan analisis, maka dirumuskan beberapa strategi :

- 1) Perlu dibangun komunikasi yang efektif oleh Kementerian Perindustrian dengan pondok pesantren untuk penentuan jenis pelatihan, spesifikasi alat, identifikasi kebutuhan.
- 2) Peningkatan durasi pelatihan dan materi pelatihan yang lebih fokus, diberikan pelatihan lanjutan (leveling) untuk peningkatan skill peserta,
- 3) Perlu diberikan pendampingan peningkatan kualitas produk, manajemen dan pemasaran, selama kurun waktu tertentu kepada peserta setelah pelatihan. Kementerian Perindustrian dapat melakukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi melalui kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (pengabdian masyarakat).
- 4) Memberikan informasi terkait akses sumber bahan baku maupun sparepart mesin peralatan produksi agar pondok pesantren lebih mandiri

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan program penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren telah terlaksana sesuai dengan rencana, dan memberikan manfaat bagi pondok pesantren untuk meningkatkan keterampilan santri dalam berusaha, menumbuhkan unit usaha baru di pondok pesantren, dan juga meningkatkan penghasilan pondok pesantren.
- b. Bantuan fasilitasi berupa pelatihan, bantuan alat dan pameran telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kinerja usaha yang diukur dari tingkat produksi, omzet, penyerapan tenaga kerja dan pemasaran.
- c. Rekomendasi yang diberikan diantaranya peningkatan komunikasi pemerintah dengan pesantren dalam penentuan jenis pelatihan maupun spesifikasi alat, proposal yang diajukan harus menggambarkan potensi pesantren, peningkatan durasi pelatihan dan materi pelatihan lanjutan untuk peningkatan skill peserta, adanya pendampingan setelah pelatihan, memberi akses sumber bahan baku dan sparepart yang spesifik kepada pesantren

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Siaran Pers Kementerian Perindustrian* (2020). (<https://kemenperin.go.id/artikel/21413/Lulusan-Santripreneur-Binaan-Kemenperin-Lampau-8-Ribu-Peserta>), diakses 30 November 2020.
- [2] Conor (1974). *Monitoring Pekerjaan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- [3] Issac, S. dan Michael, W.B. (1984). *Handbook in Research and Evaluation for Education and Behavioral Sciences (2nd ed)*. San Diego: Edits Publisher
- [4] Worthen, B.R. dan Sanders, J.R. (1979). *Education Evaluation: Alternative Approach and Practical Guidelines*. New York: Longman
- [5] Handayani, S (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- [6] Sudarsono (1994). *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia
- [7] Walpole, Ronald. (2005). *Pengantar Statistika*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.